



KELANJUTAN PROYEK SALURAN DRAINASE

Pemkot Yogya Tunggu Surat KPK

MERAPI-TRI DARMYATI

Sejumlah pengendara melintasi proyek drainase di Jalan Soepomo yang dibiarkan mangkrak.

UMBULHARJO (MERAPI) - Nasib proyek saluran drainase Jalan Soepomo dan sekitarnya mandek karena rekanan ter-sangkut dugaan suap. Hasil kon-

nunggu surat resmi dari lembaga itu.

"Saat konsultasi menyampaikan, tunggu saja surat tertulis dari KPK. Itu yang sedang kami tunggu," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (19/9) lalu.

Menurutnya yang penting bagi Pemkot Yogyakarta ada landasan untuk menghentikan atau melanjutkan pekerjaan proyek saluran drainase itu dengan pihak ketiga yang lain.

Hal yang masih menjadi pertanyaan, lanjutnya, apakah proyek itu sudah cukup untuk pemeriksaan. Terutama jika nanti dibawa ke pengadilan apakah proyek itu sudah cukup menjadi barang bukti.

"Yang kami cari landasan dulu. Bisa dari KPK atau LKPP. Tapi karena ini masih dalam pe-

sultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemkot Yogyakarta diminta me-

meriksa KPK, kami harap KPK bisa memberikan landasan," ujarnya.

Pihaknya mengakui dampak dari terhentinya pengerjaan proyek itu sudah signifikan ke masyarakat sekitar. Dia menjelaskan kondisi jalan sudah digali 2/3 dan cukup dalam. Akses jalan yang tersisa hanya sepertiga. Jika bulan depan sudah mulai musim hujan, tanah bisa masuk ke lubang galian saluran air hujan itu.

"Kami sudah sampaikan pertimbangan itu (dampak proyek terhenti) saat konsultasi. Misalnya menghentikan, kita uruk saja (galiannya) untuk menjaga agar warga tidak terganggu dengan jalan yang sudah digali," terang Heroe.

Secara terpisah Inspektur Kota Yogyakarta Maryoto me-

nyebut sampai kini belum ada jawaban tertulis dari KPK dan LKPP setelah Pemkot Yogyakarta melakukan konsultasi ke lembaga tersebut.

"Kami tetap menunggu jawaban tertulis dulu. Baik dari LKPP maupun KPK," imbuh Maryoto.

Seperti diketahui hampir sebulan proyek saluran drainase Jalan Soepomo yang mulai dikerjakan di Jalan Babaran sisi barat terhenti. Dampaknya akses jalan itu hanya bisa dilalui kendaraan bermotor roda dua dan beberapa lubang galian. Rekanan yang mengerjakan proyek dan oknum jaksa pengawal Tim Pengawasan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Pusat Daerah (TP4D) terkena operasi tangkap tangan KPK.

1.

Tindak Lanjut

(Tri)-m

Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005